

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dinamis dalam mengubah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga indikator keberhasilan suatu pembangunan dalam bangsa, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi serta semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Tujuan paling utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus mampu pula mengurangi kemiskinan, kesenjangan pendapatan serta mengurangi tingkat pengangguran (Todaro, 2003:20). Dari sini dapat diketahui, prioritas pembangunan adalah mengurangi bahkan menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu isu terpenting dalam perekonomian Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan juga merupakan fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan dapat timbul akibat adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya yang ada di masyarakat (Maipita, 2013:1).

Menurut Bank Dunia (dalam Maipita, 2013:2) Kemiskinan ini juga merupakan masalah global. Sebagian orang mampu memahami istilah ini secara

subjektif dan komparatif. Sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain juga memahaminya dari kajian ilmiah atau sudut pandang yang lebih mapan. Dampak negatif yang bisa dirasakan akibat kemiskinan, selain timbulnya masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Kemiskinan yang tinggi menimbulkan beban lebih besar yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menopang kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan. Seperti dalam statistik resmi dari BPS tingkat kemiskinan menurun secara signifikan dari 40 persen ke sekitar 11 persen selama 1976–1996, dan penurunan terbesar selama dekade 1970–an hingga awal 1980–an dengan 13 persentase poin, sedangkan selama periode 1981–1993 laju pertumbuhannya hanya sekitar 16 persentase poin. Dampak krisis moneter ekonomi tahun 1997 sampai 1998 mengakibatkan naiknya angka kemiskinan mencapai 23,5 persen, namun berangsur surut di awal tahun 2000–an. Pada tahun 2006 diduga akibat pemotongan subsidi BBM terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 17,75 persen (Tambunan, 2009:105).

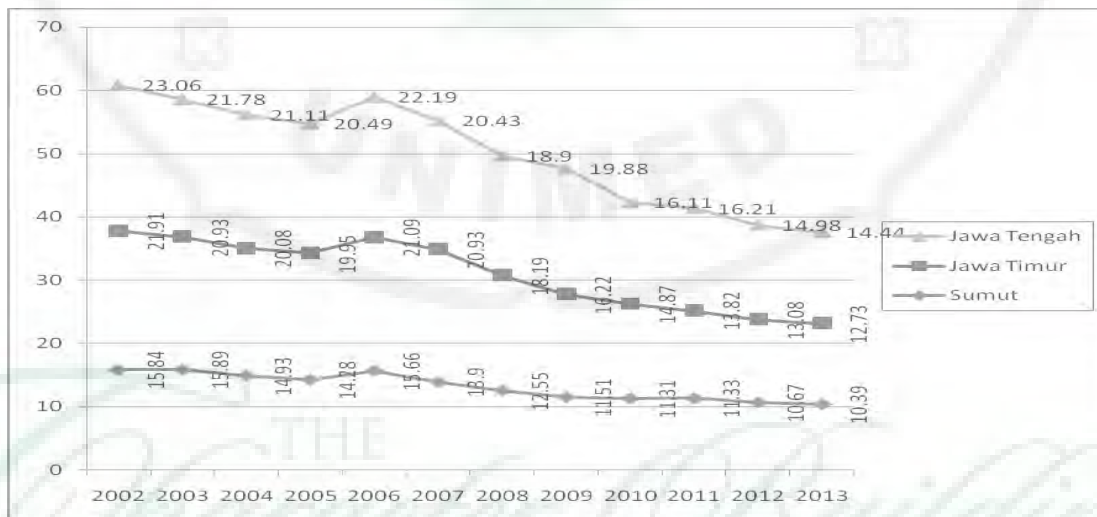
Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia di tahun 2007 meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan secara simultan dan menyeluruh. Hasilnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari tahun 2006 sebesar 17,75 persen menjadi sebesar 11,47 persen di tahun 2013 (BPS, 2014).

Kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan. Sebagai masalah yang bersifat multidimensi.

Kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah mudah. Banyak faktor yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan.

Gambar 1.1 menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2002 sebesar 15,84 persen, berkurang pada tahun 2013 sebesar 10,39 persen, yaitu mencapai 5,45 persen. Namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Timur, percepatan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara termasuk lambat.

Jawa Timur, dari tahun 2002 sampai 2013, menunjukkan penurunan yang tajam dari 21,91 persen menjadi 12,73 persen, yaitu mencapai 9,18 persen. Percepatan penurunan di Jawa Tengah juga lebih baik dibanding Sumatera Utara yaitu sebesar 7,62 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara, 2014

**Gambar 1.1** Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2002–2013

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan. Dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan.

**Tabel 1.1 Jumlah Murid SD, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi di Sumatera Utara. 2011–2013 (Jiwa)**

Tahun	SD	SMP	SMA	SMK	P. Tinggi
2011	1.518.154	652.498	577.786	228.809	244.768
2012	1.572.622	652.498	577.786	257.795	243.878
2013	1.609.950	552.761	233.916	270.048	244.947

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2014

**Tabel 1.2 Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan. 2013**

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.89	2.61	1.59
2. Tidak/belum tamat SD	7.76	11.19	9.14
3. Tamat SD	21.4	23.05	22.06
4. Tamat SMP	26.6	21.37	24.49
5. Tamat SMA	36.3	30.98	34.16
6. Diploma I/II/III/IV. Universitas	7.05	10.80	8.56
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Sumut - Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2013

Dari tabel 1.3 dapat dilihat persentase tertinggi angkatan kerja adalah dari pendidikan SMA sebesar 34,16 persen, menyusul SMP sebesar 24,49 persen, dan SD sebesar 22,06 persen. Hal ini menunjukkan bagaimana rendahnya produktivitas masyarakat dilihat dari besarnya angkatan kerja justru bukan dari perguruan tinggi yang seharusnya mendominasi penawaran di pasar tenaga kerja.

Dilihat dari tabel 1.2 tercatat bahwa pencari kerja yang terdaftar mengalami fluktuasi sejak dari tahun 2005–2012. Selanjutnya pada partisipasi angkatan kerja dari tahun 2005 sebesar 71,94 persen cenderung menurun sampai tahun 2012 sebesar

69,41 persen. Pada tingkat pengangguran tahun 2005 sebesar 6,20 persen, meningkat menjadi 10,98 persen.

**Tabel 1.3 Persentase TPAK dan TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2005–2012**

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (persen)
2005	71.94	6.20
2006	66.90	6.37
2006	67.49	7.43
2008	68.33	8.45
2009	69.14	9.10
2010	77.10	10.10
2011	72.09	11.51
2012	69.41	10.98

Sumber: BPS Sumut, 2005-2012 (Diolah)

Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator–indikator yang jelas. Sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan (Suharto, 2009).

Secara teori jika pertumbuhan ekonomi yang ditandai dari peningkatan pendapatan per kapita suatu wilayah, menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya perlu diperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dan pola konsumsi masyarakat, dan aspek lainnya yang menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dan mampu mengurangi kemiskinan (Maipita, 2013).

**Tabel 1.4 Perkembangan PDRB, Pendapatan per Kapita dan Pengeluaran per Kapita Sumatera Utara. (Atas Dasar Harga Konstan 2000-2012)**

Tahun	PDRB atas dasar harga konstan 2000 (miliar/Rp)	PDRB Per kapita (Rp)	Pengeluaran Per kapita (Rp)
2006	93.347,40	7.383.039	287.434
2007	99.792,27	7.926.528	313.190
2008	106.172,36	8.140.606	391.767
2009	111.559,22	8.420.590	432.389
2010	118.718,90	9.138.734	499.694
2011	126.587,62	9.660.525	564.565
2012	134.463,95	10.028.302	599.060

Sumber: BPS Sumut, 2013

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai 2012 ada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pada tahun 2006 pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp7.383.039, dan tahun selanjutnya meningkat, sampai di tahun 2012 menjadi Rp 10.174.790. Bila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita, terjadi peningkatan konsumsi masyarakat pada tahun 2006 sebesar Rp287.434 meningkat selama beberapa tahun selanjutnya, hingga di tahun 2012 menjadi Rp599.060.

Beberapa program sudah dijalankan oleh pemerintah bagi rumah tangga miskin yang diharapkan bisa mengurangi pengeluaran untuk komoditi tertentu. Berkurangnya pengeluaran rumah tangga pada komoditi tertentu diharapkan meningkatkan konsumsi terhadap komoditi lain yang lebih penting sehingga mengubah pola konsumsi rumah tangga atau bahkan bisa disimpan untuk digunakan pada masa yang akan datang. Konsumsi terhadap jenis makanan yang memberikan kalori yang baik bagi tubuh akan meningkatkan produktivitas penduduk dalam bekerja karena energi yang diperoleh. Oleh karena itu perlu dicermati konsumsi atau

pengeluaran per kapita secara dominan digunakan untuk mengkonsumsi jenis makanan apa.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh konsumsi rata-rata per kapita masyarakat, pendidikan, pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh konsumsi rata-rata per kapita masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders, baik dalam akademis (keilmuan) maupun praktis. Kegunaan penelitian yang dimaksud adalah:

1. Dapat dijadikan alat evaluasi dalam kerangka kebijakan pemerintah yang berperspektif pembangunan propoor atau program dana bantuan bagi masyarakat miskin agar lebih cermat dalam memilih keluarga layak bantu.
2. Memperkaya khasanah keilmuan tentang pentingnya melihat kebutuhan yang mendasar dan sangat dibutuhkan bukan yang malah merusak kehidupan dan tatanan peradaban manusia.